

# PERAN KEPALA SUKU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT<sup>1</sup>

Oleh: Januaris Syama<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Suku dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat didistrik Moskona Utara dan dampak dari Kepala Suku Moskona Utara berperan dalam aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini adat istiadat dan juga berperan dalam partisipasi Masyarakat di Distrik Moskona utara Kabupaten Teluk Bintuni.*

*Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dengan nara sumber dan Observasi yang di lakukan untuk menjawab kuesioner dan juga permasalahan penelitian diatas.Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukan peran Kepala Suku dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat berjalan secara baik.Selanjutnya,peran Kepala Suku partisipasi dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2014.*

*Konsep Peran Kepala Suku adalah sebuah sambutan yang ditunjukan kepada seseorang yang menjadi figur sentral dalam suatu suku atau kelompok masyarakat . Sri Sudaryatmi ( 2000:46)*

*Temuan hasil penelitian Kepala Suku Moskona Utara ikut partisipasi politik dalam pemilihan umum legislative dan juga mengarahkan masyarakat untuk ikut kesertaan dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara*

*Melalui penelitian ini,peneliti menyarankan perlunya mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi Peran Kepala suku dalam partisipasi politik secara berkala ke kampung-kampung se Distrik Moskona Utara .Perlunya pemerintah mengoptimalkan peran Kepala suku dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. diberi kesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalam ruang publik seperti halnya dilibatkan sebagai anggota partai politik,ataupun organisasi sosial politik lainnya.*

**Kata kunci: Peran ,Kepala Suku, Partisipasi Politik**

## PENDAHULUAN

Kepala Suku ialah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi figure sentral dalam sebuah suku atau kelompok masyarakat.Namun,banyak orang mengkonotasikan suku sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya masih jauh dari unsur peradaban. Sebagian masyarakat suku sering di identik dengan sebuah kelompok masyarakat hayati di pedalaman hutan.Mereka mengisolasikan diri dari kehidupan global luar. Kepala suku memiliki sebuah peran sosial terikat pada hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara.

Dalam kehidupan masyarakat yang menganut paham kesukuan, peran kepala suku sangat sentral tidak sembarang dalam kelompok atau suku tersebut. Inilah yang membedakan masyarakat tergolong dalam kehidupan suku dengan masyarakat yang sudah menganut paham modernitas atau mengenal peradaban. Ada beberapa faktor penentu yang menjadikan seseorang dapat dipilih dan menduduki jabatan sebagai kepala suku. Biasanya seorang kepala

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

suku dipilih berdasar faktor keturunan dan harus berjenis kelamin laki-laki. Jika garis keturunan langsung dari seorang kepala suku tak ada yang berkelamin laki-laki, barulah jabatan kepala suku akan ditentukan melalui sebuah upacara adat. dalam upacara adat, biasanya di ikuti oleh para sesepuh dan tokoh suku tersebut yang memutuskan tentang siapa kepala suku baru, jika kepala suku meninggal maka di ganti dengan keturunan laki-laki.

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan di berikan kepada provinsi papua dan papua barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat papua. Otonomi Khusus papua di berikan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia melalui undang-undang Nomor 21 tahun 2001 menjadi isi undang-undang adalah: Pengaturan kewenangan antara pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi yang di lakukan otonomi khusus.

Pembagian Pembagian wewenang, tugas dan tagung jawab yang tegas dan jelas antara badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif serta majelis Rakyat papua sebagai representasi kultural penduduk asli papua yang di berikan kewenangan tertentu.

Dalam Otonomi khusus (OTSUS), khususnya pada pasal 6 di sebutkan bahwa: Kekuasaan legislatif provinsi papua dan papua barat di laksanakan oleh DPRD. DPRD terdiri atas anggota yang di pilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota DPRD adalah  $1 \frac{1}{4}$  (satu sperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi papua dan papua barat sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Peran Kepala Suku adalah mengatur masalah adat-istiadat dimana masalah masalah yang apa terjadi maka dia yang selesaikan oleh sebab itu masyarakat semua mendengar apa yang di lakukan oleh kepala suku. Masalah demokrasi Kepala suku juga mendengar dari Kepala Distrik dan Masyarakat untuk ikut partisipasi dalam kegiatan politik yang berjalan secara langsung dan dia juga ikut serta memilih. dan secara Demokratis tidak ada unsur pakasaan dari Kepala Suku terhadap warga masyarakat Distrik Moskona Utara. Oleh karena itu bahwa kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi.

Rendahnya partisipasi masyarakat distrik Moskona Utara dalam Pemilu yang baru saja berlangsung disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Pertama, masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang di dasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, di akibatkan persoalan teknis dalam pemilu.

Dalam hal ini jumlah warga yang tidak terdaftar sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. pelaksanaan pemilu menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pemilu sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Ketiga, partisipasi juga di pengaruhi oleh kepentingan individual pemilih.

Permasalahan Peran Kepala Suku memiliki sebuah peran sosial dan tak terikat pada hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara.

Kehidupan mereka lebih di dasarkan pada kepatuhan pada kepala suku, serta mengadopsi kearifan lokal sebagai tuntunan perilaku. Dalam kehidupan masyarakat yang menganut paham kesukuan, peran kepala suku sangat sentral tidak sembarang orang dalam kelompok atau suku tersebut.

Permasalahan Kepala Suku mampu menyerahkan masyarakat dalam partisipasi yang menjadi fokus kepala suku di dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Adapun yang menjadi peran dari pada kepala suku adalah memberikan pengarahan, pembinaan, motivasi kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. kepala suku mengatur masyarakat untuk berpartisipasi jalannya pemilihan umum dan mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat terkait dengan pesta demokrasi diselesaikan oleh kepala suku.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tinggi karena turut diarahkan kepala suku, supaya masyarakat ikut dalam memilih pada pemilihan umum baik legislatif maupun presiden. Maka Kepala suku melakukan rapat terbuka antara semua anggota masyarakat untuk satuan tujuan bersama dalam jalannya pemilihan umum dan apapun yang terjadi maka tanggung jawab kepala suku untuk semua anggota masyarakat di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti tentang peran Kepala suku dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum di distrik Moskona Utara Tahun 2014. Kajian paling mendasar dalam penelitian ini adalah peran kepala suku dalam Peningkatan partisipasi politik masyarakat, atau paling minimal adalah anggota sukunya, berdasarkan kenyataan yang ada dilokasi penelitian kepala suku merupakan kepala adat bagi masyarakat setempat yang sangat di hormati dan disegani, ada pemisahan kekuasaan antara kepala suku dan kepala pemerintahan (kepala kampung) bagi masyarakat hubungan dengan pelaksanaan bernegara didalam tugas dan perannya kepala kampung, sedangkan kepala suku berperan dalam melaksanakan hukum adat, kebiasaan yang menjadi budaya bagi sukunya, sedangkan di satu sisi masyarakat sangat menghargai kepala suku, tetapi domainan kepala suku ini tidaklah dalam bidang politik dan pemerintahan, apabila kepala suku juga dapat memainkan perannya dalam memberikan motivasi kepada anggotanya agar turut terlibat berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, hal ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat.

Pada penelitian ini agar lebih objektif, peneliti memilih objek penelitian adalah masyarakat yang ada di distrik Moskona Utara sebagai tempat penelitian, dimana terdapat satu suku yang pada pemilihan umum partisipasi masyarakat terbilang rendah.

Fenomena yang terjadi di Distrik Moskona Utara peran kepala suku dalam Peningkatan partisipasi politik masyarakat, atau paling minimal adalah anggota Sukunya, berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi penelitian kepala suku merupakan kepala adat bagi masyarakat setempat yang sangat dihormati dan disegani, ada pemisahan kekuasaan Kepala suku berperan dalam melaksanakan hukum adat, kebiasaan yang menjadi budaya politik bagi sukunya.

Permasalahan pada awalnya Tahun 2000 dan 2005 tidak ada masyarakat Distrik Moskona utara yang berpartisipasi, sedangkan Tahun 2007 di angkat Kepala Suku Moskona Utar maka dia arahkan masyarakat dan memberikan motivasi kepada anggota-nya agar turut terlibat berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum mulai dari Tahun 2007-2014, hal ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat di Distrik Moskona Utara .

Kepala Suku dia mengotor masyarakat dalam masalah adat-istiadat yang terjadi maka Kepala Suku mempertanggung jawabkan terhadap anggota masyarakat supaya mereka memahami hukum adat yang berjalan secara langsung dan juga Kepala suku mengotor masyarakat sesuai dengan keinginan di suatu daerah tersebut. dan juga Kepala suku memberikan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Bagaimana peran Kepala Suku dalam perkembangan-nya kehidupan masyarakat Moskona Utara adalah

1. Menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Kepala suku serta pemerintahan formal dalam sebuah Negara.
2. Menjaga adat kebijakan masyarakat terkait dengan budaya nenek moyang.
3. Pendorong kemajuan kehidupan masyarakat
4. Memberikan pemahaman/ pengertian kepada anggota masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Berdasarkan hasil peneliti bahwa kepala suku sangat berperan dalam pengambilan keputusan yaitu memecahkan masalah-masalah adat istiadat, sosial kemasyarakatan, dan politik khususnya pemilihan umum, yaitu memberikan arahan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum memberikan suara untuk memilih salah satu partai dan calon yang telah menjadi kesepakatan antara kepala suku tokoh Pemuda, tokoh Adat, tokoh Agama, dan tokoh Masyarakat dalam rapat tertutup, yang di sampaikan pada rapat terbuka dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ada di distrik Moskona Utara. Disamping itu pula kepala suku turut memainkan peran dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan kampung yang ada di Wilayah Moskona Utara.

Maksud dan tujuan utama pembentukan Teluk Bintuni sebagai sebuah entitas pemerintahan lokal yang berdiri sendiri antara lain adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan umum dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Salah satu sarana untuk mencapai dua tujuan utama dimaksud adalah penyelenggaraan berbagai jenis bidang dan urusan pemerintahan yang sudah di desentralisasikan kepada daerah dan pelaksanaan APBD. Sementara sejak dilakukan pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung secara aman dan demokratis pada 2 Desember 2005, di Kabupaten Teluk Bintuni terbentuk Pemerintah Daerah Definitif dengan Drg. Alfons Manibui, DESS.

Sebagai Bupati dan Drs. H. Akuba Kaitam sebagai Wakil Bupati.

Dengan diterbitkannya PERDA Kabupaten Teluk Bintuni No. 3 Tahun 2007, wilayah kabupaten ini di kembangkan lebih lanjut menjadi 24 Distrik, 113 kampung dan 2 kelurahan.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala suku dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di distrik Moskona Utara pada pemilihan umum legislatif tahun 2014?.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran peran kepala suku dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di distrik Moskona Utara pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.

## **Manfaat Penelitian**

Yang menjadi focus pada penelitian ini adalah Peran Kepala Suku di Distrik Moskona Utara dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Adapun yang menjadi peran dari pada Kepala Suku adalah memberika pengarahan,pembinaan,motivasi kepada anggota suku atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

## **METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISI DATA**

Untuk memperoleh data atau informasi yang berguna untuk penelitian metode-metode sebagai berikut:

Pengumpulan data Primer ini, maka penulis menggunakan Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan data yang diteliti. Pengumpulan data akan di lakukan dengan menggunakan metode yang sudah rasim di gunakan pada pendekatan kualitatif yaitu Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan nara sumber. Key informan) dengan perbedoman pada wawancara yang telah di susun sebelumnya dan observasi yang di lakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat fakta yang ada di lapangan secara langsung tentang Peran Kepala Suku dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Distrik Moskona Utara

### **Analisa Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan, dan data yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner (angket) akan dianalisa melalui table distribusi frekuensi dan dianalisa menurutketerangan yang diberikan responden. Sedangkan data dari hasil wawancara akan diuraikan dengan masing- masing tokoh yang dijadikan key informan.

## **KERANGKA TEORI**

Konsep Peran (Sri Sudaryatmi (2000: 46)

- a. Konsep Peran Kepala Suku Memakai istilah „suku bangsa,, saja karena istilah “kelompok etnik” dalam hal ini tidak cocok.Sifat kesatuan dari suatu suku bangsa bukan sifa kesatuan suatu kelompok,selain sifat kesatuan ”golongan,,Maka konsep suku bangsa adalah suatu golongan yang terikat oleh suatu kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan dan kesatuan bahasa .
- b. Konsep kepemimpinan Menurut Weber dapat dibedakan menjadi tiga jenis ideal ( ideal type) yaitu:
  1. Kepemimpinan tradisional yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah di berikan oleh masyarakat dan juga sebagai keadan pada kesucian tradisi kuno.
  2. Kepemimpinan rasional yang berdasarkan kepada hukum atau legalitas peraturan.
  3. Kepemimpinan kharismatik yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu .

## **PEMBAHASAN**

Suku Moskona merupakan salah satu suku besar Pegunungan Arfak, sebelumnya, suku ini mendiami wilayah administrasi Kabupaten Manokwari, namun seiring perkembangan wilayah yakni pemekaran Kabupaten Teluk

Bintuni dari Kabupaten Manokwari tahun 2003, Suku Moskona masuk ke dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki 7 (tujuh) Suku besar yang mendiami wilayahnya di antaranya, Moskona, Irarutu, Sumuri, Sebyar, Sougb, Wamesa, dan Kuri serta terdapat juga suku pelengkap Nusantara lainnya.

Suku Moskona memiliki 8 (delapan) distrik yaitu, Distrik Merdey (Distrik tertua sejak jaman Belanda) Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, Distrik Mayado, Distrik Moskona Timur, Distrik Masyeta, Distrik Moskona Barat dan Distrik Biscoop di kabupaten Teluk Bintuni, Papua barat. Dengan demikian pemekaran daerah Moskona yang telah diusulkan ke pusat sebagai daerah DOB baru, dan sementara di ambang pintu (telah penetapan RUU pada paripurna DPR RI, salah satu dari 33 calon DOB di Papua).

Dalam pemilihan umum legislatif pada Tahun 2009 di Distrik Moskona Utara, dibandingkan dengan pemilihan umum pada tahun 2014 terdapat perbedaan angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dimana untuk tahun 2009 pemilih berjumlah 910 orang sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1025 orang, terjadi kenaikan angka sebesar 115 orang. Peningkatan ini turut dipengaruhi oleh Peran Kepala Suku yang turut mendorong anggota sukunya untuk ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum Distrik Moskona Utara Tahun 2014.

Menurut pendapat Informan memberikan informasi yang kami dapat yaitu:

*Kepala Suku Moskona Utara ikut mengarahkan masyarakat agar menggunakan suaranya dalam pemilihan umum tahun 2014 yang lalu, biasanya arahan itu disampaikan oleh Kepala Suku pada saat pertemuan-pertemuan rutin suku moskona, Kepala Suku selalu mengingatkan agar menggunakan hak suara*

*dalam pemilihan umum, sebagai wujud dari keikutsertaan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar baik.*

*Kepemimpinan Kepala Suku bagus dalam menguatkan dan mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi politik maupun mengatur masalah adat istiadat setempat khususnya yang berada di Distrik Moskona Utara*

*Kepala Suku mengatur masyarakat untuk pemilihan umum legislatif tingkat distrik maupun 10 kampung yang ada di Moskona Utara untuk jalannya pemilihan umum legislatif dan mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat terkait dengan pesta demokrasi .*

*Kepala Suku memiliki peran dalam budaya politik local yang ada di wilayah moskona, lebih khusus distrik moskona utara dan kepala suku juga turut berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif, bapak kepala suku Simon orocomna dia orangnya peduli terhadap kegiatan-kegiatan politik dalam hal ini pemilihan umum dan juga bapak Kepala Suku berperan dalam kegiatan politik yang berlangsung di Distrik Moskona utara, dan kepala suku turut mengontrol 5 kampung yang ada di Distrik Moskona Utara.*

*Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tinggi karena turut diarahkan oleh Kepala Suku, supaya masyarakat ikut dalam memilih pada pemilihan umum baik legislatif maupun presiden” Melakukan rapat terbuka antara semua anggota masyarakat untuk satuan tujuan bersama dalam jalannya pemilihan umum legislatif dan apapun yang terjadi maka tanggung jawab kepala suku untuk semua anggota masyarakat di distrik moskona utara.*

*-Analisis*

*Hasil penelitian yang informan memberikan informasi tentang peran kepala suku dalam hal ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat maupun adat istiadat di Distrik Moskona Utara kabupaten Teluk Bintuni. Peran Kepala Suku dalam partisipasi politik masyarakat lebih tinggi dan hasil penelitian yang kami melihat bahwa seorang Kepala Suku mempunyai fungsi peran lebih baik dalam partisipasi politik maupun hukum adat.*

*Mulai dari Tahun 2000-2005 warga masyarakat Moskona kurangnya partisipasi politik tidak berjalan dengan baik, pada Tahun 2007 diangkat Kepala Suku maka pemilihan 2009-2014 lebih tinggi, karena diarahkan oleh Kepala Suku dan kepala suku memberikan motivasi, arahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik maupun adat istiadat berjalan dengan baik.*

Berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh informan melalui wawancara yang dilakukan dapat digeneralisasi bahwa selama ini masyarakat yang ada di Distrik Moskona Utara, yang juga tergabung dalam suku Moskona cenderung mengakui dan merasakan peran yang dilakukan oleh kepala suku dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam mengikuti pemilihan umum legislatif di Distrik Moskona Utara.

Informan yang kami ambil hasil penelitian secara langsung terdiri dari:

- 1. Anggota Masyarakat di ambil dari 5 Kampung dimana tiap-tiap kampung di ambil 1 orang keseluruhan 5 orang wawancara secara langsung.*
- 2. Kepala Suku di Distrik Moskona Utara Pola atau sistem kepemimpinan Kepala Suku tentunya berbeda-beda dan Kepemimpinan ini juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat distrik Moskona Utara.*

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Suku Moskona Utara:

- 1. Apakah yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban sebagai kepala suku?*

*Fungsi kepala suku adalah mengatur masalah-masalah adat istiadat yang berlangsung antara warga masyarakat saya di distrik Moskona Utara serta memberikan motivasi kepada 10 kepala kampung dalam mengontrol jalannya pemerintahan di kampung.*

- 2. Bagaimana saudara dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala suku?*

*Sebagai kepala suku melaksanakan tugas mulai tahun 2007 sampai tahun 2014 yaitu mengatur masyarakat dan membantu masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan sosial maupun mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, kami dipilih sebagai kepala suku fungsinya memecahkan masalah adat istiadat yang terjadi di masyarakat.*

- 3. Apakah kepala suku turut terlibat dalam kegiatan politik praktis?*

*Kami sebagai kepala suku sudah terlibat dalam kegiatan politik praktis sejak menjabat sebagai kepala suku, yaitu mengarahkan masyarakat agar turut serta dalam pemilihan umum.*

- 4. Apa yang saudara lakukan apabila ada kegiatan-kegiatan/ agenda pemerintah seperti pemilu? Apa saudara turut memberikan pemahaman atau pengertian kepada anggota masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik.*

*a. sebelum jalannya pemilu Kepala Suku memberikan himbuan kepada semua kepala kampung untuk rapat tertutup antara 5 kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat supaya satukan*

*pikiran untuk memilih partai yang mempunyai powel /kekuatan di kabupaten.*

- b. Melakukan rapat terbuka antara semua anggota masyarakat untuk satuan tujuan bersama dalam jelannya pemilihan umum legislatif dan apapun yang terjadi maka tanggung jawab Kepala Suku untuk semua anggota masyarakat di Distrik Moskona Utara.*
- c. Anggota masyarakat yang tidak terlibat dalam rapat inforven maka masalah apapun yang terjadi, seorang okonom itu bertanggungjawab sendiri, tidak ada yang dibantu oleh kepala suku untuk di selesaikan masalah yang terjadi, entah masalah politik, masalah adat istiadat dalam lingkungan sosial.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala suku, dapat disimpulkan bahwa Kepala Suku sangat berperan dalam pengambilan keputusan yaitu memecahkan masalah-masalah adat istiadat, social kemasyarakatan, dan politik khususnya pemilihan umum, yaitu memberikan arahan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum memberikan suara untuk memilih salah satu partai dan calon yang telah menjadi kesepakatan anantara kepala suku tokoh Pemuda, tokoh Adat, tokoh Agama, dan tokoh Masyarakat dalam rapat tertutup, yang disampaikan pada rapat terbuka dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ada di Distrik Moskona Utara. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin informal (Kepala Suku) di Distrik Moskona Utara mampu mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik masyarakat dengan tingkat keberhasilan pembangunan di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, Kepala Suku memanggil para Tokoh untuk melakukan rapat tertutup menetapkan partai apa atau kepada siapa pilihan akan dijatuhkan, hal ini tentunya dalam pandangan umum bertentangan dengan asas pemilu itu sendiri, namun dalam masyarakat papua hal ini dianggap benar karena sesuai dengan kebiasaan adat istiadat yang berlaku, dalam adat papua dikenal dengan peran Bigman dan noken sebagai symbol atau alat politik.

Dsitrik Moskona Utara merupakan salah satu distrik pemekaran yang baru terbentuk pada tahun 2003 sebagai pecahan dari distrik Merdei. Sebelumnya wilayah distrik Moskona Utara merupakan bagian dari sub satuan wilayah pembangunan distrik moskona utara.

Distrik Moskona Utara terdiri dari 10 kampung yaitu: kampung Moyeba induk, Kampung Mosum, Kampung Meristim, Kampung Moyeba Utara, Kampung Moyeba Timur, Kampung yumara, Kampung Meven, Kampung Inofina, Kampung Mosror, Kampung Mesyam Timur, dengan luas wilayah distrik adalah 1663,1430.

Berikut ini adalah batas-batas wilayah Dsitrik Moskona Utara:

Utara	Distrik Kebar Kabupaten Tambraw
Timur	Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni
Selatan	Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni
Barat	Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat

Jumlah pemilih yang ada di Distrik Moskona Utara berdasarkan hasil statistik yang diperoleh dari Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 1.025 pemilih, yang tebagi atas 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara pada pemilihan

umum legislatif tahun 2014 adalah sebanyak 1.025 orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. TPS Kampung Mosum jumlah suara 210 orang
2. TPS Moyeba Induk jumlah suara 315 orang
3. TPS Inofina jumlah suara 300 orang
4. TPS Meristim jumlah suara 200 orang

Hasil pemilihan umum legislatif di Distrik Moskona Utara berdasarkan partai politik adalah sebagai berikut:

partai Golkar 700 suara, PDIP 300 suara, dan Nasdem 25 suara. Secara lebih terperinci minimnya keberadaan Kepala Suku Distrik Moskona utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Suku Distrik Moskona Utara tidak memiliki kantor yang seharusnya dijadikan tempat untuk mengolah maupun tempat masyarakat untuk melaporkan Masalah adat istiadat
2. Anggota masyarakat hanya sebatas pada pendidikan yang tertinggi adalah SMA.
3. Tidak tersedianya sarana komunikasi antar anggota Masyarakat, baik dalam bentuk telepon selular, maupun radio pendek, sehingga menyulitkan koordinasi antara anggota masyarakat dengan Kepala Suku .
4. Sarana transportasi yang masih sulit di jangkau, dimana prasarana jalan yang masih belum memadai.
5. Minimnya anggaran yang diterima oleh Kepala Suku, sehingga kurang memungkinkan untuk melengkapi sarana-sarana yang dibutuhkan.

Luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah 18.637 Km<sup>2</sup>. Pada awal pembentukannya, Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 10 distrik saja. sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, maka Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 distrik.

Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002.

Utara	Distrik Aifat Timur, Kabupaten Sorong Selatan dan Distrik Kebar, Testega, Menyambouw, Sururey Kabupaten Manokwari
Timur	Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari; Distrik Wamesa, Windesi Wasior Barat Kabupaten Teluk Wondama; dan Distrik Yaur Kabupaten Nabire
Selatan	Distrik Kaimana, Teluk Arguni Kabupaten Kaimana dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
Barat	Teluk Bintuni; Distrik Kokoda, Aifat Timur Kabupaten Sorong Selatan

Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang di berikan dan Peran juga bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan sebagai suatu kebijakan. Peran Kepala suku, dapat disimpulkan bahwa Kepala Suku sangat berperan dalam pengambilan keputusan yaitu memecahkan masalah- masalah adat istiadat, sosial kemasyarakatan, dan politik khususnya pemilihan umum, yaitu memberikan arahan Kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum memberikan suara untuk memilih salah satu partai dan calon yang telah menjadi kesepakatan anantara Kepala Suku tokoh Pemuda, tokoh Adat, tokoh Agama, dan tokoh Masyarakat dalam rapat tertutup, yang disampaikan pada rapat terbuka dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ada didistrik Moskona Utara. Disamping itu pula Kepala Suku turut memainkan peran

dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan kepala-kepala kampung yang ada di Wilayah Distrik Moskona Utara.

Peran Kepala Suku ikut mengarahkan masyarakat agar menggunakan suaranya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang lalu, biasanya arahan itu disampaikan oleh kepala suku pada saat pertemuan-pertemuan rutin suku Moskona, kepala suku selalu mengingatkan agar menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, sebagai wujud dari keikutsertaan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar baik.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin informal (Kepala Suku) di Distrik Moskona Utara mampu mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik masyarakat dengan tingkat keberhasilan pembangunan di Wilayah Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, Kepala Suku memanggil para Tokoh untuk melakukan rapat tertutup menetapkan partai apa atau kepada siapa pilihan akan diatuhkan, hal ini tentunya dalam pandangan umum bertentangan dengan asas pemilu itu sendiri, namun dalam masyarakat Papua hal ini dianggap benar karena sesuai dengan kebiasaan adat istiadat yang berlaku, dalam adat Papua dikenal dengan peran Bigman dan noken sebagai simbol atau alat politik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kepala Suku di Papua khususnya Kepala Suku Moskona mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk menyelesaikan sengketa adat istiadat, sengketa atau permasalahan antar warga masyarakat yang ada di Distrik Moskona Utara.
2. Kepala Suku Moskona melakukan pengarahan dan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta memberikan suara pada kegiatan pemilihan umum, termasuk melakukan kontrol kepada kepala-kepala kampung yang ada di Distrik Moskona Utara.
3. Saat Menjelang Pemilihan Umum Kepala Distrik bersama dengan Kepala Suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya melakukan rapat tertutup untuk membuat suatu keputusan memilih salah satu partai atau calon tertentu pada pemilihan umum, untuk selanjutnya dilakukan arahan kepada seluruh anggota masyarakat agar menyatukan pilihan sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh Kepala Suku.

### **Saran**

1. Perlu adanya pemisahan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh kepala suku dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi salah persepsi antar tugas kepala pemerintahan dengan kepala suku.
2. Perlu dilakukan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, untuk menjalankan fungsi partai politik, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi politiknya.
3. Perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai keputusan yang diambil kepala suku dalam menentukan pilihan pada salah satu calon atau partai.

## **DAFTAR PUSTAKA.**

- Althof, Philip dan Michael Rush, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003.
- Budiarjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Sri Sudaryatmi, 2000, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Timur Papua, Nimboran, Teluk Humbolt, Tabla, Yaona, Skou, Arso, Waris. (Mansoben, 1995: 201-220). sistem kepemimpinan (Kartini Kartono, 2011: 32). Kepemimpinan tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri
- Herbert McClosky (Damsar 2010: 181) Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Prenada Meida Group, 2010.
- Huntington, Samuel. P & Joan M. Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Yudhoyono Bambang, Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Kartono, 1983. Pemimpin dan Kepemimpinan. Koentjaraningrat, 1972. Beberapa Pokok Antropologi. Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Mansoben, J.R., 1995. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya. Leiden: LIPI-RIJKS Universiteit Leiden.
- Onong Effendi U, 1981. Kepemimpinan dan Komunikasi. Alumni, Bandung.
- Pamudji S.MPA., 1987. Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990. Hukum Adat Indonesia, Edisi, Rineka Cipta, Bandung.
- Sri Sudaryatmi, 2000, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Hadari Nawawi (1990:64) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Wijaya, 1987. Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila.
- Winardi, 1990. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Rineka Cipta, Bandung